

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|--------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Kompas |

Jalan Pintas atau Masalah Baru

Sekolah-sekolah negeri merekrut guru honorer sebagai jalan pintas mengatasi kekurangan jumlah pendidik. Namun, penambahan guru honorer menimbulkan masalah baru di tengah target pemerintah menihilkan status guru honorer, Desember 2024.

Pengalihan status guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) tahun-tahun sebelumnya terhambat seretnya pengangkatan para pengajar tidak tetap itu.

Lowongan guru honorer tersedia ketika jumlah guru ASN di sekolah negeri terbatas. Jika diangkat pemerintah sebagai honorer daerah, guru memperoleh gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sekitar Rp 750.000 per bulan atau lebih.

Kalau sekolah tidak mendapatkan jatah honorer, sekolah terpaksa mengangkat guru honorer berbekal surat keputusan kepala sekolah. Honorinya diambil dari bantuan operasional sekolah (BOS), rata-rata Rp 100.000 per orang per bulan (Kompas.id, 28 Oktober 2024).

Menjadi ASN, baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), adalah harapan guru honorer mendapatkan kepastian status dan jaminan kesejahteraan.

Guru salah satu SMP negeri di Kabupaten Serang, Banten, Heti Kustrianingsih, mengawali karier sebagai pengajar tidak tetap di SD pada 2006. Ia direkrut karena sekolah memang sedang kekurangan guru.

"Tiba-tiba ada yang pensiun. Tidak mudah cari penggantinya," ucap Dewan Pembina Forum Guru Ho-

norer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPISI) itu, awal November.

Merangkap

Karena sekolah kurang tenaga, ia merangkap tugas, mulai dari guru Bahasa Inggris, kesenian, hingga mengurus tata usaha. Heti direkrut sebagai jalan pintas mengatasi krisis guru, tetapi sewaktu-waktu ia bisa "disisihkan" jika jumlah guru ASN di sekolahnya memadai.

Karena itu, ia juga memburu status ASN lewat sejumlah seleksi. Sayangnya, kesempatan jadi PNS amat minim dua dekade terakhir. Di masa Presiden Joko Widodo, lahirlah guru dengan status PPPK agar makin banyak guru honorer yang ASN.

Heti lulus menjadi ASN PPPK lewat seleksi 2021, tetapi baru mendapatkan surat keputusan penempatan di sekolahnya sekarang pada April 2024. Ia bersyukur, tetapi belum lega. Banyak anggota FGHNLPISI belum mendapatkan hak beralih status menjadi ASN PPPK, apalagi sempat ada pembatalan penempatan bagi 3.000-an guru honorer tahun 2021.

Karena pengangkatan guru honorer yang ASN minim, krisis guru di sekolah-sekolah terus terjadi. Pengelola sekolah negeri terpaksa merekrut honorer daripada kegiatan belajar-mengajar terganggu. "Saya tidak bisa menyalahkan sekolah. Ini dilema," ucap Heti.

Dilema terjadi ketika ada guru PPPK baru, sedangkan sekolah penempatan guru lanjutan merekrut honorer. Guru honorer tersebut berpotensi tidak mendapatkan jam mengajar.

Catatan Perhimpunan Pen-

didikan dan Guru, di Jawa Barat sejak awal 2024 ada 466 kasus fenomena geser-menggeser jam guru. Jam mengajar guru honorer berkurang secara bertahap akibat mulai masuknya guru-guru PPPK ke sekolah tempat mereka bekerja.

Di Jakarta, pernah ada pembersihan guru honorer oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ratusan guru honorer dipecat karena direkrut kepala sekolah tanpa sepengetahuan dinas. Ini buntut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakannya proses rekrutmen guru honorer oleh sekolah-sekolah negeri di Jakarta tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022.

Adapun kepala sekolah terpaksa menerima guru honorer karena krisis pengajar. "Setiap bulan kami meminta ke dinas, tetapi tidak serta-merta saat ada guru pensiun ada penggantinya," kata Mutia, Kepala SMA Negeri 112 Jakarta Barat, akhir Juli (Kompas.id, 23/7/2024).

Data Persatuan Guru Republik Indonesia 2024, terdapat 3.413.618 guru di Indonesia. Sebanyak 1.256.570 orang atau 36,81 persen berstatus PNS, 770.134 orang (22,56) PPPK, guru swasta 902.531 orang (26,44 persen), lalu guru honor yang belum terangkat di sekolah negeri 484.483 orang (14,19 persen).

Sekretaris Jenderal PGRI Dudung Abdul Qodir mengingatkan, itu baru data guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada pula guru-guru honorer di bawah naungan Kementerian Agama yang belum terdata jumlahnya.

(JOG/DIV/FRD/ILO)